

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Artefak merupakan suatu istilah bagi barang-barang bukti kehidupan manusia di masa lalu. Lebih tepatnya, artefak adalah benda yang dibuat oleh manusia dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu (Preston, 2022). Pasca meningkatnya gerakan dekolonisasi pada tahun 1950an, isu kepemilikan artefak kerap menjadi isu yang penuh perdebatan. Isu kepemilikan ini bermula dari keadaan dunia pada masa ekspansi imperial, terkhususnya pada masa ekspansi Kekaisaran Inggris. Upaya ekspansi wilayah Kekaisaran Inggris dari abad ke-17 sampai 19 menjadikan mereka sebagai kekaisaran terbesar dalam sejarah (M. Gandhi, 2024).

Kekaisaran Inggris tercatat melakukan pengambilan paksa benda-benda milik koloni atau kerajaan lain pada masa berkuasanya (Hicks, 2021). Artefak-arte-fak tersebut dibawa tentara atau pemerintah Inggris ke Inggris dan masuk ke koleksi artefak bersejarah di museum atau menjadi koleksi bangsawan Inggris. Pada masa pasca kolonial, Inggris mulai didesak untuk mengembalikan barang-barang yang diambil dari negara-negara asal dari British Museum. Namun, Inggris kerap menolak permintaan maupun tuntutan pengembalian artefak yang ditujukan kepada British Museum. Hal ini menyebabkan perdebatan dan sengketa kepemilikan artefak yang berlangsung, bersamaan dengan munculnya berbagai opini mengenai posisi Inggris dalam menyikapi peninggalan sejarah milik budaya negara lain.

British Museum, yang dibuka pada tahun 1753, merupakan museum publik nasional gratis pertama di dunia (British Museum, t.t.-b). Museum ini memiliki koleksi barang yang bervariasi secara internasional, dengan tujuan agar semua orang dapat belajar berbagai bidang studi dalam satu tempat. Pemahaman tersebut memiliki kesamaan dengan istilah ‘Universal Museum’, yaitu museum yang memiliki koleksi dan berfokus pada peninggalan budaya dari seluruh dunia, ketimbang berfokus pada satu budaya atau sejarah nasional. Memang, British Museum tidak secara resmi menandatangani Deklarasi Museum Universal pada tahun 2002, namun institusi ini juga menggunakan titel tersebut secara informal (Opoku, 2010). Klaim ini mencerminkan apa yang dalam konteks permuseuman disebut sebagai universalisme, yaitu pandangan bahwa artefak budaya dari seluruh dunia merupakan warisan bersama umat manusia yang paling baik dijaga dan dipresentasikan dalam museum-museum besar yang terbuka untuk publik (Merryman, 1986; Curtis, 2006).

Deklarasi Museum Universal menyatakan bahwa tugas utama museum adalah mengedukasi masyarakat dunia melalui koleksi multikultural yang ada di museum. Tugas tersebut tercermin pada argumen yang diberikan pihak British Museum ketika ditanya oleh BBC pada tahun 2023 tentang isu pengembalian Parthenon Marbles, yaitu “...*we’re not going to dismantle the Museum’s collections because as it tells the story of our common humanity.*” serta yang tertulis dalam situs web resmi British Museum tentang koleksi Parthenon Marbles bahwa ‘patung (yang ada di dalam British Museum) adalah suatu warisan milik dunia’ (BBC News, 2023). British Museum juga menulis di situs

web resminya bahwa tujuan utama mereka adalah mengumpulkan koleksi yang mewakili berbagai budaya dunia serta memastikan bahwa koleksi tersebut disimpan dengan aman, dilestarikan, dikelola, diteliti, dan dipamerkan (*Governance | British Museum, t.t.*). Selain itu, British Museum menyatakan bahwa mereka juga memegang amanah bagi bangsa dan dunia atas koleksi seni dan barang-barang antik dari berbagai budaya, baik yang kuno maupun yang masih ada hingga kini (*About Us | British Museum, 2013*).

Namun, banyak masyarakat dunia mempertanyakan etika dan moral British Museum. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dari jutaan artefak yang dimiliki, sebagian besar koleksi berasal dari luar wilayah Inggris, meskipun Inggris tetap menjadi penyumbang terbesar jika dilihat secara individual (Thomas, 2024). Dalam hukum internasional, ada aturan yang mengatur tentang barang hasil pencurian kolonialisme, yaitu Konvensi UNESCO 1970. Konvensi itu menyebutkan bahwa pencurian, penjarahan, dan perdagangan ilegal mengenai barang-barang budaya merupakan sebuah kejahatan, yang akan merampas budaya dan sejarah negara yang terdampak, sehingga barang sejarah harus dijaga oleh negara asli sebagaimana seharusnya (UNESCO, 2023). Namun, hukum tersebut hanya dapat diterapkan pada kasus yang terjadi setelah tahun 1970, sehingga Inggris terhindar dari konsekuensinya. Untuk memperkuat argumennya, Inggris memiliki undang-undang nasional yang mendukung penahanan artefak di Inggris, yaitu British Museum Act 1963. Undang-undang tersebut melarang institusi untuk mengembalikan karya kepada orang lain tanpa syarat-syarat tertentu (Tremayne-Pengelly, 2023).

Selain British Museum Act 1963, British Museum juga pernah menolak tawaran mediasi UNESCO dengan alasan bahwa mereka bukan badan pemerintah (*Parthenon Sculptures - the Trustees' Statement* | *British Museum*, t.t.). Pada tahun 2021, Komite Antarpemerintah UNESCO untuk Mendorong Pengembalian Barang-Barang Budaya (ICPRCP) merekomendasikan agar British Museum mengembalikan patung-patung Parthenon ke Yunani. ICPRCP memberikan tekanan tambahan ini kepada British Museum dan pemerintah Inggris setelah terjadi kebocoran besar di galeri yang menyimpan patung-patung Parthenon. Dalam pernyataan resminya, British Museum mengatakan bahwa kejadian kebocoran tersebut tidak memengaruhi kondisi koleksi Parthenon, dan kemungkinan pengembalian koleksi tersebut tidak akan terjadi karena patung-patung tersebut dipindahkan ke Inggris dengan sepengetahuan dan izin penuh dari otoritas hukum yang berlaku pada saat patung-patung tersebut diambil (Cherry & Campbell, 2021). Penolakan terhadap rekomendasi ICPRCP dan upaya mediasi oleh UNESCO menunjukkan adanya ketegangan antara posisi institusional dan sikap politik Inggris, terutama mengingat Inggris sendiri merupakan anggota ICPRCP. Di sisi lain, pemerintah Inggris juga kerap memperlihatkan ambiguitas dalam menyikapi isu kolonialisme. Hal ini tercermin dari pernyataan King Charles III pada tahun 2018 dan 2022 yang pernah menyatakan penyesalan atas negara-negara yang terdampak perbudakan dan mengakui kekejaman kolonial bangsanya, tetapi tidak secara eksplisit meminta maaf. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, Boris Johnson, Perdana Menteri ke-55 Inggris, memberikan pernyataan bahwa ia

ingin membangkitkan kembali kekuatan imperialisme Kerajaan Inggris. Ketika ia masih menjadi anggota Partai Konservatif Inggris, Boris pernah menulis sebuah artikel yang menggagas bahwa isu kolonialisme Inggris di Afrika seharusnya tidak pernah berakhir dan meremehkan peran Inggris dalam perdagangan budak. (Stone, 2020). Perdana Menteri ke-58 Inggris, Rishi Sunak, juga terkesan menolak memberikan opini tentang topik kolonialisme. Ia menolak meminta maaf atas perdagangan budak dan membatalkan pertemuan dengan perwakilan Yunani untuk berdiskusi terkait pengembalian marmer Parthenon pada 2023 (H. Smith, 2023; Adu, 2024).

Perbedaan opini terkait repatriasi barang-barang bersejarah juga tercermin pada masyarakat Inggris modern. Dalam survei YouGov pada tahun 2021, mayoritas publik Inggris (62%) mendukung pengembalian artefak bersejarah ke negara asalnya secara permanen, termasuk 29% yang “sangat” mendukung langkah tersebut dilakukan oleh museum. Kelompok yang paling mendukung adalah anak muda berusia 18-24 tahun, sementara kelompok yang paling menentang adalah pemilih konservatif berusia 65 tahun ke atas. Dalam survei yang sama, warga Inggris juga cenderung mendukung pinjaman sementara artefak ke negara asalnya, meskipun tidak sekuat pengembalian permanen, dengan 48% mendukung dan 31% menentang. Selain itu, sekitar 46% warga Inggris setuju bahwa artefak hasil jarahan lebih merupakan bagian dari sejarah negara asalnya daripada dari sejarah Inggris. Namun, 35% lainnya berpendapat bahwa artefak yang diambil oleh Inggris sama pentingnya, dan 6% lainnya berpendapat bahwa artefak tersebut telah menjadi bagian yang lebih penting dari

sejarah Inggris (YouGov, 2021).

Ketimpangan representasi dalam koleksi British Museum juga menjadi salah satu isu yang menarik perhatian. Dari sekitar 8 juta objek yang dimiliki, hanya sekitar 650.000 objek berasal dari Britania Raya. Meskipun Inggris merupakan penyumbang terbesar jika dilihat secara individual, sebagian besar koleksi utama justru berasal dari luar wilayah tersebut (Thomas, 2024). Selain itu, sejumlah objek sejarah dalam koleksi British Museum juga memiliki sejarah kepemilikan yang belum sepenuhnya jelas. Kondisi ini memperkuat pandangan kritis terhadap praktik pengelolaan museum, sebagaimana disampaikan oleh Chika Okeke-Agulu dalam wawancaranya dengan VOX (2020) yang menyatakan bahwa *“British Museum still behaves like a colonial museum”*. Sikap institusi yang cenderung mempertahankan kepemilikan artefak serta enggan menyelesaikan sengketa repatriasi semakin mempertegas ketegangan antara klaim sebagai penjaga warisan dunia dan kritik terhadap warisan kolonial yang masih membayangi praktiknya hingga saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam latar belakang maka peneliti menjabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

Mengapa British Museum enggan mengembalikan artefak yang diambil pada masa imperialisme, meskipun sudah ada tekanan internasional?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yakni sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis sistem pengoleksian dan sikap penolakan terhadap repatriasi artefak di British Museum dalam konteks poskolonial, guna mengungkap bagaimana praktik tersebut membentuk legitimasi kepemilikan dan narasi warisan budaya terhadap koleksi yang berasal dari luar Inggris.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis bagaimana teori poskolonialisme menjelaskan dinamika kekuasaan di balik klaim universal museum dalam konteks kepemilikan artefak kolonial di British Museum.
- b. Mengkaji bagaimana konsep *Authorized Heritage Discourse* (AHD) melegitimasi klaim kepemilikan artefak dengan asal-usul kolonial pada British Museum.
- c. Mengeksplorasi bagaimana *Post-imperial Nostalgia* Inggris bekerja sebagai motivasi di balik keengganan British Museum untuk melakukan repatriasi artefak kolonial.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada studi hubungan internasional, khususnya terkait penerapan perspektif poskolonialisme dalam menganalisis institusi budaya global. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana konsep *Post-imperial Nostalgia* dan *Authorized Heritage*

Discourse (AHD) dapat dioperasionalkan secara empiris untuk membedah praktik permuseuman dan kepemilikan artefak peninggalan budaya yang tampak netral, namun sesungguhnya erat dengan relasi kekuasaan poskolonial.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mendalami isu poskolonialisme di masa modern dan kebijakan institusi budaya global seperti museum, serta berkontribusi pada kajian akademik yang masih jarang dibahas dalam hubungan internasional, khususnya terkait restitusi artefak.
- b. Bagi pembaca umum, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memahami isu kepemilikan artefak budaya serta bagaimana artefak tersebut merefleksikan keberlanjutan kekuasaan kolonial pada era poskolonial. Penelitian ini juga berpotensi mendorong masyarakat untuk mempertanyakan peran museum dan organisasi dalam mempertahankan atau menantang struktur kekuasaan imperial.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa literatur akademis sebagai referensi dalam penulisannya. Literatur pertama merupakan karya Christine Sylvester (2009) berjudul *Art/Museums: International Relations Where We Least Expect It*. Literatur ini membahas bagaimana sejatinya museum dan seni merupakan bagian dari hubungan internasional, hanya saja kurang

diperhatikan dibandingkan dengan isu lainnya. Tulisan ini menyoroti bagaimana museum dan properti budaya, seperti artefak kuno, merupakan hal yang politis, rumit, dan sangat berhubungan erat dengan identitas nasional, relasi internasional, dan kekuasaan. Penulis lebih berfokus pada logika sisi barat dalam analisis museum, yaitu teori universalitas, dimana “*hanya ada budaya internasional yang dapat kami rawat dengan sebaik-baiknya.*”. Literatur ini juga mengakui bahwa seni/museum adalah produk dari Barat dan posisinya masih rancu antara yang etis dan yang tidak.

Literatur selanjutnya membahas perkembangan hukum internasional terhadap kepemilikan artefak curian. Camden W. Brown dalam karyanya yang berjudul *Admire the Plunder, but Abhor the Thief: How the Development of International Law Perpetuates Colonial Inequities as Modern Nations Battle for the Repatriation of Looted Art and Artifacts* (2021) memberikan latar belakang hukum untuk klaim repatriasi, perkembangan hukum kekayaan budaya internasional, dan perselisihan spesifik antara Yunani dan Inggris tentang hal tersebut. Pada artikel ini, penulis menganalisis perkembangan hukum mengenai klaim repatriasi pada kasus-kasus artefak curian seperti Patung Parthenon. Penulis memasukkan peran lembaga internasional seperti United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) dalam menetapkan konvensi dan pedoman terkait dengan pelestarian properti budaya dan warisan. Menurut Brown, sistem hukum terkait properti budaya dirancang untuk terus

dieksploitasi oleh negara-negara Barat yang mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, sistem hukum internasional dapat melindungi dan mengizinkan pencurian dan kepemilikan ilegal atas karya seni dan artefak budaya yang dicuri di masa lalu.

Studi selanjutnya membahas perdebatan mengenai konsep museum universal dan posisi artefak sebagai representasi identitas nasional maupun sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Dalam artikelnya "*Whose Culture Is It?*", Kwame Anthony Appiah (2006), yang merujuk pada pemikiran John Henry Merryman (1986), menekankan bahwa budaya bersifat dinamis, hibrida, dan tidak dapat direduksi menjadi milik eksklusif suatu negara. Perspektif ini cenderung mendukung gagasan internasionalisme budaya, di mana artefak dipandang sebagai bagian dari warisan umat manusia dan seharusnya ada di museum karena merupakan ruang lintas budaya yang terbuka. Menurut Appiah, konsep 'kemurnian budaya' hanya mencerminkan politik identitas yang mereduksi sejarah kompleks di balik objek tersebut, sehingga penulis mempertanyakan kelayakan negara-negara modern untuk meminta kembali objek peninggalan sejarah di museum negara lainnya. Meskipun begitu, Appiah juga mengakui bahwa repatriasi itu dibutuhkan jika memang objek tersebut memiliki urgensi keagamaan atau ritual bagi negara asal.

Pandangan Appiah (2006) dan Merryman (1986) dapat dikritisi melalui pemikiran Gayatri Chakravorty Spivak (1998) dalam "*Can the Subaltern Speak?*" yang menyoroti bagaimana kelompok yang terpinggirkan,

termasuk komunitas asal artefak, sering kali tidak memiliki ruang untuk menyuarakan kepentingannya secara autentik karena narasi dominan dibentuk oleh aktor yang memiliki otoritas. Dalam konteks ini, klaim universalitas museum berpotensi mereproduksi ketimpangan epistemik dengan tetap menempatkan institusi seperti British Museum sebagai penentu makna dan kepemilikan atas artefak. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Spivak menciptakan konsep *strategic essentialism* yang menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana negara atau komunitas asal secara strategis membangun klaim identitas budaya yang kolektif guna memperkuat tuntutan repatriasi, meskipun identitas tersebut pada dasarnya bersifat kompleks dan tidak homogen. Konsep ini menjadi respons strategis terhadap ketidaksetaraan struktural dalam sistem hukum internasional yang didominasi oleh perspektif Barat.

Literatur selanjutnya, yaitu Alice Procter (2020), berpandangan sejalan dengan Appiah (2006) dan Merryman (1986). Dalam karyanya *The Whole Pictures: The colonial story of the art in our museums & why we need to talk about it*, Procter berargumen bahwa museum-museum besar seperti British Museum adalah suatu ‘rak piala’ bagi pemenang, yaitu bangsa kolonial. Procter menyatakan bahwa narasi yang ada di dalam museum-museum “universal” terbatas pada lingkup kolonial. Museum, menurutnya, merupakan suatu ruang politik yang dibangun oleh status, ideologi, dan keinginan pihak yang berkuasa, bukan suatu ruang akademis yang netral. Fakta bahwa museum merupakan warisan kekerasan dan penindasan tidak

akan pernah hilang karena kekerasan ada di dalam fondasi mereka, yaitu asal-usul koleksi mereka. Procter memang tidak menolak gagasan museum sebagai suatu ruang lintas budaya lewat koleksi artefak yang ditawarkan, namun butuh adanya usaha dekolonisasi secara menyeluruh. Procter mendukung penuh aksi repatriasi berdasarkan keadilan, tanggung jawab sejarah, dan etika terhadap negara tempat artefak ditemukan. Namun, jika memang museum tidak dapat merepatriasi artefak, ia berargumen bahwa museum harus bertanggung jawab penuh atas narasi artefak tersebut agar dapat merepresentasikan secara utuh budaya yang dilupakan.

Melengkapi perspektif Procter, karya Dan Hicks (2020) berjudul *The British Museums* secara langsung menganalisis British Museum melalui kasus Benin Bronzes, berargumen bahwa museum tersebut merupakan institusi kolonial yang belum bertransformasi secara mendasar. Hicks menegaskan bahwa museum-museum besar di Barat, khususnya British Museum, tidak dapat dipahami sebagai institusi netral yang semata-mata berfungsi melestarikan warisan budaya. Menurutnya, museum adalah suatu struktur historis kolonial yang secara aktif mereproduksi ketimpangan kekuasaan melalui praktik pengumpulan, penyimpanan, dan representasi artefak. Hicks mengkritik sikap institusi museum yang cenderung mempertahankan koleksi dengan menggunakan narasi universalitas dan pelestarian, yang dalam praktiknya berfungsi sebagai legitimasi atas kepemilikan yang berasal dari konteks kolonial. Oleh karena itu, Hicks menekankan pentingnya repatriasi sebagai langkah untuk mengoreksi

ketidakadilan historis serta sebagai upaya dekolonisasi institusi museum.

Terdapat dua perspektif utama yang mendominasi diskusi mengenai posisi universal museum dalam konteks kepemilikan artefak. Pertama adalah perspektif poskolonial yang menekankan sejarah kekuasaan dan kekerasan dalam koleksi serta kurasi museum (Procter, 2020; Hicks, 2021). Kedua adalah perspektif universalis yang mengklaim bahwa artefak budaya merupakan warisan bersama umat manusia yang harus dinikmati semua orang, terlepas dari asal-usulnya (Merryman, 1986; Appiah, 2006). Namun, seperti yang ditekankan oleh Sylvester (2009), penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada institusi museum di Eropa dan Amerika Utara serta didominasi oleh pendekatan teoretik Barat. Belum banyak studi yang secara eksplisit menggunakan poskolonialisme untuk menganalisis klaim universalisme British Museum sebagai manifestasi dari *post-imperial nostalgia*. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif tersebut sebagai kontribusi baru dalam kajian hubungan internasional dan institusi museum.

1.5.2. Kerangka Berpikir

Teori poskolonialisme adalah salah satu teori dalam Hubungan Internasional yang memberikan perspektif kritis terhadap dampak kolonialisme dan bagaimana struktur kekuasaan imperialis terus berlanjut dalam bentuk-bentuk baru di era kontemporer, termasuk dalam institusi budaya global seperti museum (Ashcroft dkk., 2006; L. Gandhi, 2020). Oleh karena itu, institusi budaya seperti museum tidak dapat dipahami sebagai

ruang netral, melainkan sebagai area pembuatan pengetahuan yang penuh dengan kepentingan historis dan politik yang berakar pada relasi kuasa kolonial. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori poskolonialisme sebagai landasan utama untuk menganalisis keengganan British Museum terhadap repatriasi.

Kajian poskolonialisme mulai mengemuka sejak akhir tahun 1970-an, seiring munculnya karya-karya para figur utama gagasan poskolonialisme, yaitu Edward Said, Gayatri C. Spivak, Homi Bhabha, dan lainnya (L. Gandhi, 2020; Rosyidin, 2022). Dalam perkembangannya, poskolonialisme sangat dipengaruhi oleh ide-ide posstrukturalisme. Pemikiran Edward Said dalam karyanya *Orientalism* (1979) menunjukkan bahwa dominasi Barat terhadap Timur terlihat pada representasi dan produksi pengetahuan yang membentuk hierarki antara “Barat” dan “Timur”. Gagasan ini sejalan dengan konsep diskursus Foucault mengenai relasi antara pengetahuan dan kekuasaan, di mana pengetahuan berfungsi sebagai instrumen dominasi. Lebih lanjut, Gayatri Chakravorty Spivak dalam karyanya *Can the Subaltern Speak?* (1988) menekankan bahwa kelompok *subaltern* sering kali terpinggirkan dalam struktur diskursif dominan, sehingga suara dan klaim mereka tidak memperoleh legitimasi yang setara.

Dalam konteks warisan budaya, dominasi tersebut terstruktur melalui praktik permuseuman. Untuk menjelaskan mekanisme ini, penelitian ini mengacu pada konsep *Authorized Heritage Discourse* (AHD) menurut

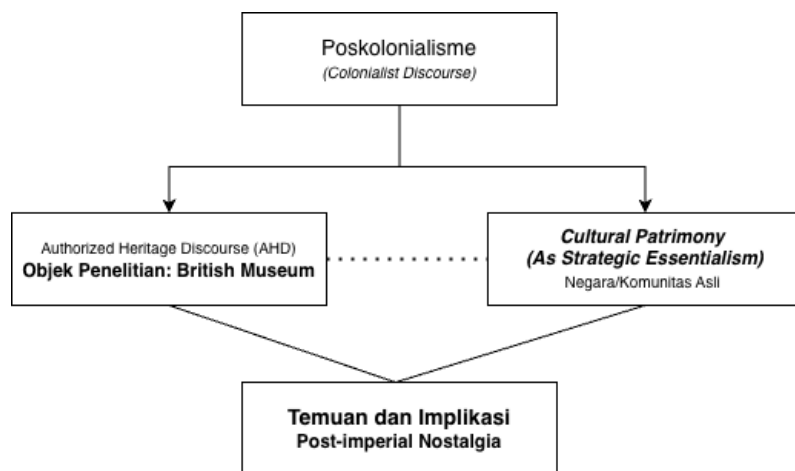
Laurajane Smith (2006). AHD merujuk pada kerangka diskursif yang memberikan otoritas kepada institusi tertentu, terutama di Barat, untuk menentukan apa yang dianggap sebagai warisan budaya yang sah. Dalam penelitian ini, AHD diposisikan sebagai konsep yang menjelaskan bagaimana dominasi tersebut dijalankan dalam praktik. Dengan demikian, AHD membantu menjelaskan konteks struktural dominasi dalam praktik permuseuman serta bagaimana narasi museum dapat membangun legitimasi atas kepemilikan artefak dan warisan budaya (Smith, 2006, dalam L. Smith & Waterton, 2012).

Keberlanjutan praktik permuseuman tidak hanya bergantung pada mekanisme diskursif. Penelitian ini berargumen bahwa terdapat dimensi ideologis yang turut menopang praktik tersebut, yaitu *post-imperial nostalgia*. Konsep ini merujuk pada kecenderungan negara atau institusi bekas imperium untuk mempertahankan dan meromantisasi simbol-simbol kejayaan imperial di masa lalu (Gilroy, 2005; Lorcin, 2018). Di British Museum, kepemilikan artefak dari wilayah bekas koloni kerap dibingkai sebagai upaya pelestarian dan “penyelamatan”. Namun, dalam konteks poskolonial, narasi tersebut dapat dipahami sebagai representasi posisi historis Inggris sebagai pusat peradaban global. Dengan demikian, *post-imperial nostalgia* berfungsi sebagai landasan ideologis yang menjelaskan mengapa praktik tersebut tetap dipertahankan dalam konteks modern. Di sisi lain, negara atau komunitas asal artefak mengembangkan bentuk resistensi terhadap dominasi narasi oleh institusi Barat. Salah satu

konsep yang digunakan adalah *cultural patrimony*, yaitu suatu budaya (baik yang berwujud maupun tidak berwujud) dari suatu kelompok sosial tertentu dimiliki secara kolektif oleh kelompok tersebut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Handler, 2015). Konsep ini menegaskan bahwa artefak budaya tidak dapat dipisahkan dari komunitas asalnya, sehingga klaim kepemilikan oleh pihak eksternal menjadi problematis. Untuk memahami lebih bentuk resistensi tersebut, Gayatri Chakravorty Spivak (1988) mengemukakan istilah *strategic essentialism* yang sering digunakan kelompok subaltern. Istilah ini merupakan suatu penyederhanaan identitas kolektif secara sementara guna mencapai tujuan politik tertentu. Dalam konteks usaha repatriasi, *cultural patrimony* dapat dipahami sebagai strategi yang digunakan oleh negara asal untuk menegaskan kembali haknya atas artefak yang diklaim, karena pendekatan tersebut cenderung lebih mudah diterima dalam kerangka hukum internasional. Pada penelitian ini, konsep *cultural patrimony* digunakan sebagai konsep pendukung untuk memperlihatkan adanya ketegangan antara legitimasi yang dibangun oleh institusi museum dan klaim kepemilikan dari pihak asal.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini berfokus pada penjelasan mengenai alasan British Museum menunjukkan keengganan untuk melakukan repatriasi artefak dari negara lain. Fokus analisis diarahkan pada identifikasi dimensi ideologis melalui *post-imperial nostalgia*, yang tercermin dalam cara museum membingkai kepemilikan

artefak sebagai bagian dari praktik pelestarian dan tanggung jawab global. Selain itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana ingatan dan romantisasi terhadap masa imperial berkontribusi dalam mempertahankan kepemilikan artefak hingga masa kini.



Tabel 1.1. Alur Berpikir Penelitian

Sumber: olahan peneliti

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. *Authorized Heritage Discourse (AHD)*

Authorized Heritage Discourse (AHD) merupakan suatu konsep yang menjelaskan bagaimana makna, nilai, dan pengelolaan warisan budaya dibentuk oleh kelompok atau institusi yang memiliki otoritas. Konsep ini dikemukakan oleh Laurajane Smith pada tahun 2006 dalam karyanya *Uses of Heritage*. AHD menanggapi bahwa warisan budaya bukanlah sesuatu yang secara alamiah memiliki nilai, melainkan hasil

konstruksi sosial yang ditentukan oleh aktor-aktor tertentu, seperti negara, museum, arkeolog, kurator, dan pakar warisan budaya. Melalui otoritas yang dimiliki, aktor-aktor tersebut memiliki kemampuan untuk menentukan objek mana yang dianggap sebagai warisan budaya, bagaimana warisan tersebut harus dipahami, serta siapa yang berhak mengelola dan merepresentasikannya kepada publik (Smith, 2006, dalam L. Smith & Waterton, 2012).

1.6.1.2. *Post-imperial Nostalgia*

Secara umum, *Post-imperial Nostalgia* merupakan konsep yang merujuk pada sikap kerinduan negara modern bekas kekuatan kolonial terhadap status geopolitik dan hegemoni global di masa lampau yang telah hilang. Konsep ini berakar pada gagasan *Imperialist Nostalgia* dalam karya Renato Rosaldo berjudul *Culture & Truth: The Remaking of Social Analysis* (1989). Gagasan ini menjadi rujukan bagi studi poskolonial di awal 2000-an, menciptakan pandangan-pandangan lain seperti "*Postcolonial Melancholia*", "*Post-imperial Nostalgia*", dan "*Colonial Nostalgia*" (Rosaldo, 1989; Gilroy, 2005; Lorcin, 2018).

Istilah nostalgia berasal dari bahasa Yunani *nostos*, "untuk pulang ke rumah," dan *algia*, "kondisi yang menyakitkan". Lorcin (2018) menjelaskan konsep ini sebagai istilah yang umumnya derogatif, diterapkan secara bebas pada berbagai bentuk kerinduan akan masa

lalu kolonial atau kekaisaran suatu negara tanpa perbedaan yang jelas di antara keduanya. Maka dari itu, *Post-imperial Nostalgia* terkait dengan penurunan kedudukan internasional, seperti politik kekuasaan, hegemoni ekonomi dan politik. Konsep ini seakan menggunakan topeng “kerinduan yang tak berdosa” baik untuk menangkap imajinasi orang maupun untuk menyembunyikan keterlibatannya dalam dominasi yang sering kali brutal (Rosaldo, 1989). Nostalgia ini bekerja melalui narasi dan praktik pengoleksian yang membingkai warisan kolonial sebagai bagian dari kontribusi positif terhadap peradaban global.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. *Authorized Heritage Discourse (AHD)*

Pada penelitian ini *Authorized Heritage Discourse* (AHD) digunakan untuk memahami cara institusi budaya besar seperti British Museum melegitimasi kepemilikan artefak non-Inggris dengan mengonstruksi narasi warisan budaya. Konsep ini diidentifikasi melalui narasi yang dikemukakan oleh pihak yang menuntut repatriasi. Indikator operasional yang digunakan meliputi:

1. Menekankan aspek materialitas dan monumentalitas, perhatian fokus pada kemegahan daripada praktik budaya yang tak berwujud (*Intangible*);
2. Artefak dan situs memiliki nilai intrinsik yang terkait dengan usia kuno yang semakin lama semakin dalam;

3. Mengutamakan pengetahuan ahli dan penilaian estetika daripada nilai-nilai lokal atau adat. (Smith, 2006, dalam L. Smith & Waterton, 2012 dan Chaliakopoulos, 2026)

1.6.2.2. *Post-imperial Nostalgia*

Konsep *post-imperial nostalgia* tersebut digunakan untuk menjelaskan dimensi ideologis yang melatarbelakangi keengganan British Museum untuk merepatriasi. Indikator *post-imperial nostalgia* meliputi:

1. Merenungi dan meromantisasi masa kolonial;
2. Menyembunyikan kekerasan kolonial dalam narasi sentimental;
3. Kehilangan status hegemoni global; dan
4. Muncul dalam budaya, museum, dan politik domestik. (Rosaldo, 1989; Gilroy, 2005; Lorcin, 2018)

Konsep ini menjadi acuan dalam menganalisis sikap Inggris dan British Museum dalam mengkurasi, mengoleksi, dan melakukan upaya repatriasi artefak peninggalan sejarah. Hal ini karena kebanyakan artefak yang berada di museum adalah milik budaya lain, bukan milik Inggris. Dalam penelitian ini, konsep *post-imperial nostalgia* diidentifikasi melalui analisis narasi yang muncul dalam pernyataan resmi museum dan dokumen terkait.

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa keengganan British Museum untuk melakukan repatriasi tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan pelestarian atau hukum, melainkan merupakan bagian dari reproduksi warisan imperial dalam konteks kontemporer. Melalui perspektif poskolonial, sikap tersebut dapat dibaca sebagai manifestasi *post-imperial nostalgia*, di mana kepemilikan artefak dibingkai sebagai tanggung jawab global, namun secara implisit mempertahankan posisi historis Inggris sebagai pusat otoritas budaya dan peradaban.

Dengan menggunakan konsep *Authorized Heritage Discourse*, penelitian ini menunjukkan bahwa klaim kepemilikan artefak pada institusi barat seperti British Museum tidak bersifat netral, melainkan manifestasi dari bagaimana pihak yang lebih berkuasa dapat mengonstruksi narasi untuk menentukan objek apa yang dianggap sebagai warisan budaya. Oleh karena itu, praktik permuseuman berfungsi bukan hanya sebagai ruang pelestarian, tetapi juga sebagai mekanisme yang mempertahankan kontrol atas narasi budaya, sekaligus mereproduksi relasi kuasa kolonial dalam bentuk yang lebih halus dan terlembaga.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami dan menganalisis makna di balik keengganan British Museum untuk melakukan repatriasi. Pendekatan ini sangat cocok karena penelitian tidak berfokus pada

pengukuran, melainkan pada bagaimana narasi, justifikasi, dan cara pandang dibangun dalam praktik permuseuman (Creswell, 2014). Dengan metode ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana museum membingkai kepemilikan artefak sebagai bentuk pelestarian dan tanggung jawab global, serta bagaimana narasi tersebut berperan dalam mempertahankan legitimasi kepemilikan atas artefak dari wilayah bekas koloni. Hal ini dapat memungkinkan peneliti untuk mengungkap kaitan narasi tersebut dengan *post-imperial nostalgia* sebagai bentuk keberlanjutan relasi kuasa kolonial dalam konteks kontemporer.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan memakai pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana British Museum membingkai kepemilikan artefak dan menyikapi tuntutan repatriasi, serta menganalisis bagaimana narasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *post-imperial nostalgia*.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah negara Inggris, khususnya institusi British Museum. Penelitian dilakukan melalui penelusuran dokumen dan sumber tertulis, seperti jurnal, media lokal atau internasional, laporan, dokumen kebijakan pemerintah Inggris, dan lain sebagainya, yang menggambarkan posisi institusi dalam isu repatriasi artefak.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Negara Inggris dan institusi

British Museum dalam isu kepemilikan dan repatriasi artefak pada tahun 2022-2024. Pada penelitian ini subjek diteliti praktik diskursif dan kekuasaannya yang mampu menciptakan ‘realitas’ dan membangun narasi dan pengetahuan terkait apa yang pantas dan tidak pantas disebut sebagai warisan budaya dan yang tidak. Maka, unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik diskursif British Museum dan Pemerintah Inggris terkait isu repatriasi artefak kolonial pada periode 2022–2024.

1.8.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif berbentuk teks. Data tersebut seperti dokumen, siaran pers, seperti pernyataan resmi dari subjek penelitian, laporan resmi institusi, kebijakan negara, serta artikel yang berkaitan dengan isu repatriasi artefak di subjek penelitian. Data ini digunakan untuk melihat bagaimana makna, *framing*, dan legitimasi kepemilikan artefak dibangun dalam narasi yang dianalisis.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini seperti dokumen resmi institusi yang diunggah pada situs resmi British Museum (www.britishmuseum.org/about-us/governance), kebijakan pemerintah Inggris dalam situs resmi Hukum Britania Raya (www.legislation.gov.uk/), laporan organisasi internasional, lalu jurnal akademik, serta artikel media yang relevan. Penggunaan berbagai sumber ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Proses pengumpulan data menggunakan data seperti pustaka terdahulu, deklarasi, dan laporan resmi yang dikumpulkan, dipilih, dan diseleksi untuk memastikan validitas data yang akan digunakan. Ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu keenggan repatriasi dan narasi yang menyertainya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan analisis diskursus kritis (*Critical discourse analysis*) sebagai teknik analisis data. Mengacu pada Dunn dan Neumann (2016), analisis *discourse* dalam penelitian sosial bertujuan untuk mengkaji bagaimana teks mengonstruksi realitas sosial. Proses pengumpulan data menggunakan korpus penelitian yaitu, sekumpulan teks yang dipilih secara sistematis untuk mengidentifikasi bagaimana suatu wacana dibentuk, diproduksi, dan dipertahankan dalam konteks sosial dan politik tertentu (Fairclough, 2003). Analisis ini dapat memperlihatkan bagaimana makna dihasilkan dan dilekatkan pada berbagai subjek dan objek sosial, yang berujung pada munculnya interpretasi-interpretasi tertentu yang membuka berbagai kemungkinan sekaligus mengesampingkan kemungkinan-kemungkinan lainnya.

Proses analisis penelitian ini akan dimulai dari penelusuran fitur kebahasaan dalam korpus termasuk pilihan kata, penggunaan kalimat pasif,

dan hal-hal yang secara strategis tidak disebutkan. Temuan kebahasaan tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan mempertimbangkan siapa yang memproduksi teks, untuk audiens mana, dan dalam situasi politik seperti apa. Pada tahap akhir, kerangka pemikiran digunakan untuk menginterpretasi makna ideologis yang bekerja di balik narasi institusional British Museum.

1.8.8 Kualitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian dijaga melalui penggunaan sumber yang kredibel, valid, dan akurat. Kualitas data dibuktikan validitasnya melalui metode pengumpulan data sekunder yang terstruktur dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, dokumen resmi, dan laporan institusi. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai data yang relevan, sementara reliabilitas dijaga dengan memastikan konsistensi informasi yang digunakan dalam analisis ini.